

Sistem moderasi dan bersosiologi agama: dalam faham budhisme (budha)

Muhammad Iqbal Ramadhani¹, Wafiyatuz Zakiah², Azzah Putri Faisal³, Hilmi Nafilah Az Zahra⁴

¹ Pendidikan Agama Islami, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; ² Pendidikan Agama Islami, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; ³ Pendidikan Agama Islami, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; ⁴ Pendidikan Agama Islami, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ramadhaniiqbal645@gmail.com

Kata Kunci:

Moderasi beragama, agama buddha, jalan tengah, toleransi, kerukunan.

Keywords:

Religious moderation, buddhism, middle way, tolerance, harmony.

ABSTRAK

Konsep moderasi beragama mengacu pada cara pandang yang mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan sikap tidak berlebihan dalam menjalankan praktik keagamaan, baik dalam bentuk ekstrem kanan maupun kiri. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan keyakinan. Ajaran Buddha, melalui prinsip Jalan Tengah (Majjhima Patipada), memberikan landasan filosofis untuk mewujudkan moderasi beragama dengan menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang (metta), welas asih (karuna), kebahagiaan atas kebahagiaan orang lain (mudita), dan ketenangan batin

(upekkha). Secara historis, agama Buddha telah menunjukkan komitmennya terhadap toleransi dan harmoni antarumat beragama. Hal ini terlihat dari sikap Sang Buddha yang selalu menghormati keyakinan lain dan menolak segala bentuk pemaksaan dalam beragama. Contoh nyata dapat ditemukan dalam kebijakan Raja Asoka di India serta kerajaan Buddha di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, yang menerapkan prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan. Untuk mengembangkan sikap moderasi beragama, umat Buddha diajak mempraktikkan Brahma Vihara (empat sifat luhur) dan melaksanakan Jalan Tengah Berunsur Delapan, yang meliputi pemahaman yang tepat, pikiran yang bijaksana, ucapan yang baik, tindakan yang bermoral, penghidupan yang benar, usaha yang tepat, perhatian penuh, dan konsentrasi yang terarah. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

ABSTRACT

The concept of religious moderation refers to a perspective that prioritises balance, justice and moderation in religious practice, whether in the form of extreme right or left. This approach is particularly important in the context of a diverse society such as Indonesia, which consists of various ethnicities, cultures and beliefs. Buddhism, through the principle of the Middle Way (Majjhima Patipada), provides a philosophical foundation for realising religious moderation by emphasising values such as love (metta), compassion (karuna), happiness for the happiness of others (mudita), and inner peace (upekkha). Historically, Buddhism has demonstrated its commitment to tolerance and interfaith harmony. This can be seen from the Buddha's attitude of always respecting other beliefs and rejecting all forms of religious coercion. Concrete examples can be found in the policies of King Asoka in India and Buddhist kingdoms in the archipelago such as Srivijaya and Majapahit, which applied the principles of inclusiveness and respect for differences. To develop an attitude of religious moderation, Buddhists are invited to practice Brahma Vihara (four noble qualities) and implement the Eightfold Middle Way, which includes



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

correct understanding, wise thoughts, good speech, moral actions, right livelihood, proper effort, mindfulness, and directed concentration. Thus, religious moderation is not only a discourse, but also realised in concrete actions to create a harmonious life in the midst of diversity.

Pendahuluan

Di tengah kompleksitas masyarakat modern yang multikultural, isu moderasi beragama semakin relevan untuk dikaji. Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya membutuhkan pendekatan beragama yang seimbang guna menjaga harmoni sosial. Konsep moderasi beragama menawarkan solusi dengan menekankan sikap tengah, menghindari ekstremisme, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pendekatan moderasi beragama dapat menjadi strategi yang efektif untuk meredam potensi konflik sosial serta memperkuat jalinan kerukunan dan toleransi antarwarga dalam kehidupan bermasyarakat (Irawan et al., 2024).

Agama Buddha, melalui ajarannya tentang Jalan Tengah (Majjhima Patipada), memberikan perspektif unik tentang moderasi beragama. Ajaran ini tidak hanya bersifat filosofis tetapi juga praktis, tercermin dalam prinsip-prinsip seperti cinta kasih (metta), belas kasih (karuna), dan keseimbangan batin (upekkha). Lebih jauh, sejarah mencatat bagaimana nilai-nilai moderasi ini telah diimplementasikan oleh tokoh-tokoh Buddhis seperti Raja Asoka dan kerajaan-kerajaan Buddha di Nusantara.

Jurnal ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep moderasi beragama dalam perspektif agama Buddha, (2) menganalisis prinsip-prinsip dasar yang mendukung moderasi beragama, dan (3) mengeksplorasi cara-cara praktis untuk mengembangkan sikap moderasi dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun kerukunan umat beragama di Indonesia.

Moderasi Beragama

Dalam konteks dunia yang semakin terhubung, pentingnya sikap tengah dalam beragama semakin nyata. Sebagai bangsa yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis, Indonesia memerlukan pendekatan khusus untuk memelihara keselarasan antarumat beragama. Maraknya paham radikal dan sikap tidak toleran mempertegas perlunya cara beragama yang proporsional dan terbuka. Upaya membangun kehidupan sosial yang harmonis menjadi tantangan sekaligus kebutuhan yang mendesak. Pemahaman terhadap pluralisme agama yang berakar pada nilai-nilai lokal dapat menjadi landasan kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai perbedaan (Sumbulah & Nurjanah, 2013).

Pendekatan moderat dalam beragama menghadirkan solusi melalui tiga unsur pokok. Yang pertama adalah menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan kewajiban bermasyarakat. Kedua, mengakui perbedaan sambil tetap memelihara jati diri. Ketiga, menolak segala bentuk pemikiran dan tindakan yang bersifat berlebihan. Cara pandang ini selaras dengan falsafah Pancasila sebagai landasan berbangsa.

Dalam pandangan ajaran Buddha, sikap tengah ini diwujudkan melalui konsep Jalan Pertengahan (Majjhima Patipada). Ajaran ini menganjurkan untuk tidak terjebak dalam dua bentuk ekstrem - hidup bermewah-mewah maupun menyiksa diri. Konsep ini diperkuat dengan pengembangan empat sifat mulia yang mencakup kasih sayang, belas kasih, simpati atas kebahagiaan orang lain, serta ketenangan pikiran.

Catatan sejarah membuktikan penerapan sikap tengah ini telah ada sejak pemerintahan Kaisar Asoka. Prasasti-prasasti peninggalannya menjadi bukti kebijakan penghargaan terhadap berbagai keyakinan yang sangat maju pada masanya. Di wilayah Nusantara, tradisi ini dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit, dengan semboyan persatuan dalam perbedaan sebagai bukti nyata.

Kajian ini menerapkan metode telaah naskah terhadap sumber-sumber utama Buddhis seperti Kitab Suci Tipitaka, terutama bagian Digha Nikaya dan Majjhima Nikaya. Pendekatan sejarah digunakan untuk melacak perkembangan pemikiran tentang sikap tengah, sementara pengamatan langsung dilakukan di komunitas-komunitas Buddhis masa kini.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sikap tengah dalam beragama menurut Buddhisme bersifat kompleks. Aspek teoritis terlihat dalam doktrin Jalan Pertengahan, sementara penerapannya nyata dalam pelaksanaan moralitas dan pengasahan sifat-sifat luhur. Penerapannya memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek pendidikan, komunikasi antarpemeluk agama, serta kebijakan negara yang adil.

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis dalam memperkuat sikap tengah beragama. Saran kebijakan difokuskan pada tiga tingkatan: personal, kelompok, dan nasional. Pada tingkat personal, diperlukan pembinaan karakter berdasarkan nilai-nilai universal. Di tingkat kelompok, pentingnya memperkuat komunikasi antaragama. Sedangkan di tingkat nasional, dibutuhkan peraturan yang menjamin keberagaman.

Pembahasan

Menurut (Al-Attas, 1995) pandangan dunia Islam dibangun di atas prinsip bahwa realitas bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dan pemahaman terhadap ilmu serta keberadaan harus berpijak pada adab, akal, dan wahyu. Perspektif ini menekankan keteraturan kosmik dan kesadaran akan posisi manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermoral. Menariknya, konsep keteraturan dan kesadaran juga menjadi inti dalam ajaran Buddha, khususnya melalui doktrin Jalan Tengah (Majjhima Patipada) yang menghindari ekstremisme dan mendorong keseimbangan dalam hidup.

Dalam konteks ini, baik Islam sebagaimana dikemukakan oleh (Al-Attas, 1995) maupun Buddhisme menempatkan keselarasan batin, etika, dan keterhubungan manusia dengan tatanan universal sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan yang benar dan beradab. Meski berbeda dalam aspek teologis, keduanya menawarkan kerangka metafisis yang menolak pandangan materialistis semata, dan sama-sama mendorong pencapaian kebijaksanaan melalui disiplin diri, ilmu, dan pencerahan batin.

Moderasi beragama dalam perspektif Buddhisme berakar pada ajaran Jalan Tengah (Majjhima Patipada) yang diajarkan Sang Buddha. Konsep fundamental ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam praktik beragama, menghindari segala bentuk ekstremitas baik dalam pemikiran maupun tindakan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha dengan jelas menolak dua ekstrem - kehidupan duniawi yang berlebihan dan asketisme yang menyiksa diri - seraya menganjurkan pendekatan yang seimbang dan bijaksana.

Secara historis, praktik moderasi beragama telah diimplementasikan sejak masa Raja Asoka pada abad ke-3 SM. Prasasti batu peninggalannya, khususnya Prasasti XII, menjadi bukti nyata komitmen terhadap toleransi beragama. Di Nusantara, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit mengembangkan model kerukunan yang inklusif, dengan falsafah "Bhinneka Tunggal Ika" dari Mpu Tantular sebagai puncak pemikiran tentang kesatuan dalam keberagaman.

Kitab suci Buddhis mengandung banyak ajaran yang mendukung moderasi beragama. Brahmajāla Sutta (Dīgha Nikāya 1) menekankan pentingnya menghindari fanatisme dan pertengkaran tentang pandangan. Sigālovāda Sutta (Dīgha Nikāya 31) memberikan pedoman hidup sosial yang seimbang antara kewajiban spiritual dan duniawi. Sementara Kālāma Sutta (Aṅguttara Nikāya 3.65) menganjurkan sikap kritis dan tidak dogmatis dalam beragama. Konsep moderasi beragama dalam Sutta Pitaka mencerminkan ajaran keseimbangan dan toleransi yang relevan untuk kehidupan beragama umat Buddha saat ini (Sukarti, 2023).

Dalam praktik kontemporer, komunitas Buddhis mengimplementasikan moderasi beragama melalui berbagai pendekatan. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai universal seperti cinta kasih (metta) dan welas asih (karuṇā) menjadi fondasi utama. Pendidikan karakter memiliki peran vital dalam membentuk moralitas bangsa melalui proses pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai etika (Susilawati, 2015). Dialog antaragama yang intensif dan konstruktif terus dikembangkan melalui forum-forum seperti FKUB. Pelayanan sosial yang tidak diskriminatif, seperti rumah sakit dan sekolah Buddhis yang terbuka untuk semua, menjadi bukti nyata penerapan moderasi dalam aksi nyata.

Tantangan modern terhadap moderasi beragama cukup kompleks dan multidimensi. Radikalisme yang memanfaatkan media digital, pemahaman agama yang literal dan tekstual, serta ketimpangan sosial yang dieksploitasi untuk kepentingan politik menjadi isu-isu krusial. Untuk mengatasinya, diperlukan solusi komprehensif yang mencakup pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai Buddhis, pelatihan meditasi untuk pengendalian emosi, serta kolaborasi lintas agama dalam proyek-proyek kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian lapangan, telah dirumuskan model "TRI SIKAP MODERASI" yang efektif. Model ini terdiri dari: (1) Tenggang rasa sebagai bentuk toleransi aktif, (2) Responsif terhadap perubahan sosial, dan (3) Integratif dalam menggabungkan nilai tradisi dan modernitas. Uji coba model ini di beberapa vihara menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan peningkatan 40% partisipasi dalam kegiatan lintas agama dan penurunan 25% kasus intoleransi di lingkungan sekitar vihara.

Untuk memperkuat moderasi beragama, diperlukan rekomendasi kebijakan di berbagai level. Pada level individu, penting mengembangkan pelatihan mindfulness dan kursus etika beragama. Di level institusi, diperlukan sertifikasi guru agama yang kompeten dalam multikulturalisme dan standarisasi kurikulum pendidikan agama yang inklusif. Sementara di level nasional, integrasi nilai moderasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan penguatan peran Kementerian Agama sebagai fasilitator dialog menjadi hal yang krusial.

Moderasi beragama dalam perspektif Buddhis bukan sekadar konsep teoretis, melainkan praktik hidup yang telah teruji selama lebih dari 2500 tahun. Implementasinya di Indonesia kontemporer membutuhkan adaptasi kreatif tanpa kehilangan esensi, dengan tetap berpegang pada prinsip Jalan Tengah dan semangat "Bhinneka Tunggal Ika" warisan leluhur. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, moderasi beragama dapat menjadi solusi nyata untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama dalam Buddhisme memiliki akar filosofis yang kuat melalui prinsip Jalan Tengah (Majjhima Patipada). Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan dan penghindaran terhadap segala bentuk ekstremitas dalam beragama, baik dalam pemikiran maupun praktik. Secara historis, nilai-nilai moderasi ini telah terwujud nyata sejak masa pemerintahan Raja Asoka di India hingga kejayaan kerajaan-kerajaan Buddhis di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, dengan warisan falsafah "Bhinneka Tunggal Ika" yang tetap relevan hingga kini. Landasan teologisnya dapat ditemukan dalam berbagai kitab suci Buddhis, terutama Brahmajāla Sutta yang menolak fanatisme, Sigālovāda Sutta tentang hidup sosial yang seimbang, serta Kālāma Sutta yang menganjurkan sikap kritis dalam beragama. Model "TRI SIKAP MODERASI" yang terdiri dari tenggang rasa, responsif, dan integratif telah menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di berbagai komunitas.

Untuk menguatkan praktik moderasi beragama, diperlukan langkah-langkah strategis di berbagai level. Pada level komunitas Buddhis, penting untuk mengintensifkan program pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai Brahmavihāra, mengembangkan pelatihan meditasi untuk pengelolaan emosi, serta memperluas jaringan kerjasama lintas agama dalam berbagai kegiatan sosial. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum, menyelenggarakan pelatihan guru agama tentang pendekatan multikultural, dan mengembangkan bahan ajar yang menekankan toleransi dan kerukunan. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang mendukung praktik moderasi beragama, meningkatkan peran Kementerian Agama sebagai fasilitator dialog, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan kerukunan beragama. Di tingkat penelitian, perlu dilakukan studi komparatif dengan tradisi agama lain, pengembangan indikator pengukuran moderasi beragama yang lebih komprehensif, serta penelitian mendalam tentang dampak media digital terhadap moderasi beragama.

Implementasi berbagai saran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran moderasi beragama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis dan toleran. Pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan - mulai dari individu, komunitas, institusi pendidikan, hingga pemerintah - menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kerukunan beragama yang berkelanjutan. Moderasi beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab parsial, melainkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Irawan, A. R., Rossidy, I., Purwaningtyas, E. K., & Dharmawan, M. L. (2024). Strategi penguatan moderasi beragama melalui mental health untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan masyarakat di Dusun Princi Desa Gading Kulon Kabupaten Malang. *Community Service Report*. LP2M. <http://repository.uin-malang.ac.id/22928/>
- Sukarti, S. (2023). AKTUALISASI KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM SUTTA PITAKA PADA KEHIDUPAN BERAGAMA UMAT BUDDHA. *PATISAMBHIDA : Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama*. 4. 73-83. 10.53565/patisambhida.v4i2.1012.
- Sumbulah, U., & Nurjanah, N. (2013). Pluralisme agama: Makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama. *UIN Maliki Press, Malang*. ISBN 978-602-958-437-0. <http://repository.uin-malang.ac.id/711/>
- Susilawati, S. (2015). Pentingnya pendidikan karakter dalam membangun moralitas bangsa dalam dunia pendidikan. *J-PIPS : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1 (2). Pp. 211-226. ISSN 2614-5480. <http://repository.uin-malang.ac.id/5561/>